PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 7.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
- 7.2 Sesuai dengan Laporan Posisi Kas per 31 Desember 2024 yang disusun oleh Kantor Kas Daerah (Kasda), maka Ikhtisar Saldo Akhir dan Bank tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp25.220.647.624,47 yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sulselbar cabang Sidrap.
- 7.3 Sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2024, maka Ikhtisar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2024 adalah senilai Rp46.012.960.133,47 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

(dalam rupi	
TA. 2024 NILAI	TA. 2023 NILAI
25.220.647.624,47	33.268.913.820,13
42.515.000,00	108.061.700,00
16.306.962,00	136.998.329,00
61.117.474,00	1.081.774.568,96
16.866.539.128,00	26.053.562.151,40
0,00	2.263.686.825,00
2.584.202.891,00	0,00
1.221.631.054,00	4.335.689.761,00
46.012.960.133,47	67.248.687.155,49
	NILAI 25.220.647.624,47 42.515.000,00 16.306.962,00 61.117.474,00 16.866.539.128,00 0,00 2.584.202.891,00 1.221.631.054,00

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2024 disampaikan untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BUPATI

SYAHARU DDIN ALRIF